

Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan Melalui Kebijakan Publik

Nabila Zahra^{1*}, Ropiah Daulay², Ahmad Wahyudi Zein³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

nabilazahraa1806@gmail.com^{1*}, ropiahdaulay14@gmail.com², ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id³

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: nabilazahraa1806@gmail.com

Abstract. Food security is a crucial aspect of national development that ensures the availability, affordability, and safety of food for all communities. This article examines the Indonesian government's strategies to maintain food security through public policies using a qualitative literature study approach. The study focuses on agricultural infrastructure development, productivity improvement, food diversification, strengthening distribution systems, and empowering communities and farmers. Both central and regional governments play strategic roles in formulating and implementing adaptive policies addressing challenges such as climate change, resource limitations, and food price volatility. Additionally, large budget allocations and innovative financing approaches like green bonds and public-private partnerships are key instruments supporting sustainable food security. The role of regional governments is also vital in regulation, facilitation, and community empowerment to ensure local food security. The findings indicate that integrated public policies and stakeholder synergy effectively enhance national food security comprehensively and sustainably.

Keywords: Community empowerment, Food diversification, Food security, Government strategy, Innovative financing

Abstrak. Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Artikel ini mengkaji strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif studi pustaka. Fokus kajian meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, penguatan sistem distribusi, serta pemberdayaan masyarakat dan petani. Pemerintah pusat dan daerah berperan strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan fluktuasi harga pangan. Selain itu, alokasi anggaran besar dan pendekatan pembiayaan inovatif seperti green bonds dan kerja sama publik-swasta menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah juga sangat vital dalam regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan ketahanan pangan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang terintegrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Diversifikasi pangan, Ketahanan pangan, Strategi pemerintah, Pembiayaan inovatif

1. LATAR BELAKANG

Memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau dan aman merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, dan ketahanan pangan merupakan komponen kunci dari hal ini. Ketahanan pangan didefinisikan oleh Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1996 dan 2009 sebagai keadaan memiliki cukup pangan yang terjangkau, mudah diakses, dan aman untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi diet seseorang, terlepas dari status sosial ekonomi seseorang.

Kekhawatiran tentang kerawanan pangan di Indonesia memiliki beberapa dimensi,

termasuk kedaulatan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah memegang peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan ketergantungan pada impor. Strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, penguatan sistem logistik, serta pemberdayaan masyarakat dan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pangan (Miyasto, 2014). Misalnya, pemerintah daerah Kabupaten Malang mengimplementasikan strategi pengembangan lumbung pangan, pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, dan program Desa Mandiri Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan (Fiandana et al., 2014).

Selain itu, kebijakan ketahanan pangan juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam mengelola sumber daya pangan dan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan kualitas pangan nasional (Taufik et al., 2021). Implementasi kebijakan yang terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketahanan pangan, seperti yang terlihat pada studi di Kota Palembang dan Kabupaten Minahasa Selatan, di mana pemerintah melakukan pengawasan ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan (Rumawas et al., 2021) (Putra et al., 2022).

Namun, tantangan dalam menjaga ketahanan pangan masih cukup besar, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, dan pengendalian impor pangan. Oleh karena itu, strategi pemerintah harus bersifat komprehensif dan adaptif, mengedepankan peningkatan nilai tukar petani, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penguatan sistem distribusi pangan yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui kebijakan publik yang tepat dan implementasi yang konsisten, pemerintah dapat menjaga ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik, berdasarkan

kajian dari berbagai penelitian dan literatur ilmiah terdahulu. Pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan dan strategi tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta peluang dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Ketersediaan pangan yang andal merupakan landasan pertumbuhan nasional jangka panjang. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat secara memadai, aman, dan murah, dengan fokus pada pangan yang diproduksi di dalam negeri, sebagaimana dinyatakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang. Pemerintah memegang peranan penting di sini sebagai pembuat kebijakan utama yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan langkah-langkah guna memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah (Hanunnia et al., 2025).

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencakup empat pilar utama, yaitu ketersediaan pangan (*availability*), akses pangan (*accessibility*), pemanfaatan pangan (*utilization*), dan stabilitas pangan (*stability*). Ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi dan pasokan pangan yang cukup, sedangkan akses pangan menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan secara ekonomi dan fisik. Pemanfaatan pangan mengacu pada aspek gizi dan keamanan pangan, serta stabilitas pangan menekankan pada keberlanjutan ketersediaan dan akses pangan dalam jangka panjang (Syakirotn et al., 2023).

Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Ada sejumlah cara utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan, menurut evaluasi literatur dan temuan penelitian empiris. Dalam upaya untuk memperkuat sistem ketahanan pangan lokal, pemerintah daerah seperti Kabupaten Malang telah melembagakan rencana untuk membangun lumbung pangan, mempercepat diversifikasi pangan dan gizi, serta membentuk Dewan Ketahanan Pangan. Dengan mengelola sumber daya lokal dengan lebih baik dan meningkatkan kapasitas produksi, program-program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan. Dengan mendorong digitalisasi pasar dan bekerja sama dengan perusahaan milik negara (BUMN) untuk mentransfer pangan dari daerah yang

kelebihan ke daerah yang kekurangan, pemerintah federal menekankan perlunya menjaga keterjangkauan pangan. Hal ini menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pangan dengan meningkatkan rantai pengawasan dan memastikan pemerataan.

Pemerintah Kabupaten Majene menekankan pada keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga lain dalam pengelolaan ketahanan pangan mengingat wabah COVID-19. Memperbaiki kondisi ekonomi dan memastikan ketahanan pangan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pertumbuhan industri pangan lokal. Praktik Pertanian yang Baik (GAP), Praktik Penanganan yang Baik (GHP), dan kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peraturan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan. Konsumen memerlukan hal ini untuk mengetahui bahwa makanan yang mereka beli aman dan berkualitas baik. Koordinasi lintas sektor dan penerapan strategi ketahanan pangan yang komprehensif sangat penting untuk keberhasilan pembuatan kebijakan pemerintah. Meskipun kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak baik, analisis kebijakan Kota Serang menunjukkan bahwa masalah seperti kurangnya dana dan kerja sama antarlembaga harus diselesaikan jika kebijakan kota ingin lebih berhasil.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Strategi Ketahanan Pangan

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan antara lain adalah sistem logistik pangan yang belum optimal, rendahnya nilai tukar petani, penyusutan lahan pertanian, serta kurangnya diversifikasi pangan. Selain itu, perubahan iklim dan ketergantungan pada impor pangan juga menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi ketahanan pangan nasional harus berbasis pada *resource and knowledge based strategy*, yaitu dengan memberikan prioritas pada peningkatan nilai tukar petani, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, peningkatan daya dukung alam, serta pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi sebagai fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik harus bersifat komprehensif dan terpadu, meliputi pengembangan produksi dan infrastruktur pangan, peningkatan akses dan distribusi, pemberdayaan masyarakat, penerapan standar keamanan pangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga.

Kebijakan tersebut harus mampu mengatasi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, dan dinamika sosial ekonomi. Pendekatan berbasis sumber daya dan pengetahuan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan untuk menyelidiki pendekatan pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan melalui kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang telah diterbitkan. Peneliti memilih teknik studi kepustakaan karena, alih-alih mengumpulkan data dari lapangan, mereka dapat memperoleh informasi deskriptif dan konseptual yang holistik dan kontekstual (Adlini et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengikuti beberapa tahapan utama studi pustaka, yaitu: Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik ketahanan pangan dan kebijakan publik, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer dapat berupa dokumen kebijakan resmi pemerintah, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, dan laporan yang membahas aspek kebijakan publik dan ketahanan pangan. Setelah pengumpulan, data dan informasi yang diperoleh diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan tema yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan sintesis data secara sistematis (Darmalaksana, 2020).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif, yang menekankan pada pengungkapan makna dan proses berdasarkan perspektif subjek dan konteks kebijakan publik dalam menjaga ketahanan pangan. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan isi literatur secara kritis dan komprehensif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang strategi pemerintah yang telah dan sedang diterapkan. Dalam penelitian kualitatif studi pustaka, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi dan sintesis data dari berbagai sumber pustaka. Oleh karena itu, kemampuan peneliti dalam memahami, mengkritisi, dan menghubungkan berbagai temuan dari literatur sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan bermakna.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan berbagai strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik secara komprehensif dan kontekstual, berdasarkan kajian literatur yang telah dianalisis. Dengan demikian, metode kualitatif studi pustaka sangat tepat digunakan untuk mengkaji strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif berdasarkan kajian literatur yang terpercaya dan relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Program Stimulus Pemerintah untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Agar pangan tetap terjangkau, tersedia, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, ketahanan pangan merupakan komponen penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara. Di tengah berbagai ancaman seperti wabah COVID-19 dan perubahan kondisi ekonomi global, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah program dan kebijakan stimulus dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan akses pangan di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 44 ayat (1), pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berkewajiban untuk menangani masalah pangan (Atmoko & Fajarwati, 2022). Peraturan Presiden 82 Tahun 2020 yang menetapkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu contoh aturan strategis yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Selain bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, peraturan ini juga berfungsi sebagai "tameng" ketahanan pangan dalam segala bentuknya, mulai dari produksi hingga distribusi, untuk mencegah terjadinya anarki sosial akibat ketidakpastian harga dan pasokan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi pangan nasional melalui pembangunan dan renovasi jaringan irigasi seluas jutaan hektare sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, infrastruktur irigasi ini sangat penting untuk mendukung sentra produksi pangan dan menjamin ketersediaan air untuk pertanian. Untuk melindungi petani dan konsumen dari fluktuasi pasar yang merugikan, pemerintah menggunakan regulasi harga sebagai alat untuk mengatur harga komoditas pertanian seperti beras (Maulana et al., 2024). Misalnya, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar sebesar Rp76,9 triliun untuk mendukung

berbagai inisiatif yang bertujuan untuk membuat harga pangan lebih terjangkau, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, mendiversifikasi sumber pangan, dan memperkuat sistem pangan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan Program Cadangan Pangan Pemerintah (PPP) untuk menjamin akses pangan bagi penduduk rentan. Keluarga yang memenuhi syarat untuk program ini mendapatkan beras dan bahan pokok lainnya secara berkala sebagai cadangan pangan (KPM). Meskipun masih terdapat kendala, seperti birokrasi yang berbelit-belit dan keterlambatan pengiriman, PPP telah membantu meringankan beban keuangan rumah tangga berpendapatan rendah dan meningkatkan ketersediaan pangan di tempat-tempat seperti Desa Godog sejak tahun 2022 (Yuliansyah et al., 2025).

Stimulus fiskal juga diberikan secara khusus pada sektor pertanian sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan stimulus fiskal yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga daya beli petani. Menteri Pertanian menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan utama dalam percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Stok beras nasional yang mencapai lebih dari 4 juta ton merupakan capaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir, menandakan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Selain itu, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 121 pada Mei 2025 menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani akibat stimulus yang efektif.

Kebijakan dan program stimulus yang dilaksanakan pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui regulasi strategis, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, pengaturan harga pangan, serta program cadangan pangan dan stimulus fiskal, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan. Keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, strategi kebijakan publik ini menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Alokasi Anggaran Besar untuk Ketahanan Pangan dan Pendekatan Pembiayaan Inovatif

Alokasi anggaran besar untuk ketahanan pangan dan pendekatan pembiayaan inovatif merupakan dua aspek penting dalam strategi pemerintah Indonesia untuk

menjaga ketahanan pangan nasional melalui kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya mengalokasikan dana yang signifikan, tetapi juga mengadopsi metode pembiayaan baru yang dapat mempercepat pembangunan sektor pangan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebagai bagian dari komitmen nasional dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2023, anggaran ketahanan pangan mencapai sekitar Rp95 triliun, meningkat dari Rp94,1 triliun pada tahun sebelumnya (Purwanto, 2022). Anggaran ini difokuskan pada berbagai program strategis, seperti peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur pertanian (termasuk irigasi dan waduk), serta dukungan langsung kepada petani dan nelayan melalui subsidi pupuk, kredit resi gudang, dan stabilisasi harga pangan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan lumbung pangan nasional (*food estate*), yang bertujuan memperkuat cadangan pangan dan meningkatkan produktivitas lahan secara terintegrasi. Food estate ini dilaksanakan dengan pendekatan korporasi agar petani dapat berkelompok dalam koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan), sehingga lebih mudah mendapatkan akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lainnya. Program ini juga mendukung diversifikasi pangan dengan memperluas produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong sebagai alternatif bahan pangan selain beras.

Selain itu, petani skala kecil, yang secara historis memiliki akses terbatas ke pasar, teknologi, dan keuangan, akan memiliki kapasitas yang diperkuat oleh pengeluaran keuangan yang substansial ini. Untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, pemerintah menawarkan pelatihan, penyuluhan, dan akses ke pinjaman berbunga rendah. Hasilnya, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sistem pertanian berkelanjutan, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan infrastruktur fisik. Pemerintah telah mengambil strategi baru untuk mendanai ketahanan pangan dalam jangka panjang, melengkapi alokasi APBN. Obligasi hijau, yang diterbitkan untuk mendanai proyek pertanian yang bertanggung jawab secara ekologis yang memprioritaskan energi terbarukan dan pengelolaan air yang efektif, merupakan inovasi yang signifikan. Untuk mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemerintah menerbitkan obligasi hijau untuk menarik investor. Perusahaan swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian

melalui program Kemitraan Publik-Swasta (KPS), yang merupakan opsi lain. Efisiensi produksi atau skala ekonomi dapat ditingkatkan dengan percepatan pertumbuhan pabrik pengolahan makanan, jaringan distribusi, dan teknologi pertanian melalui KPS. Semua hal dipertimbangkan, kemitraan ini meningkatkan sistem pangan negara dan meningkatkan akses petani kecil ke modal. Mikrofinansial dan urun dana merupakan dua bentuk pembiayaan berkelanjutan yang membantu usaha pertanian lokal dan petani kecil mendapatkan akses ke uang. Urun dana memungkinkan masyarakat luas untuk berinvestasi dalam inisiatif pertanian lokal, sementara mikrofinansial berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Untuk mempromosikan penggunaan teknologi modern, metode pertanian organik, dan diversifikasi pasokan pangan yang ramah lingkungan, strategi ini sangat penting. Alokasi uang yang besar dan opsi pendanaan yang kreatif sangat penting bagi rencana pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kebijakan publik. Kemampuan petani, khususnya petani skala kecil, serta infrastruktur sedang diperkuat oleh pengeluaran anggaran yang berjumlah puluhan miliar rupiah. Pertanian yang berkelanjutan dan adil dapat didukung oleh inovasi keuangan termasuk obligasi ramah lingkungan, KPS, mikrofinansial, atau urun dana. Tujuan pemerintah adalah untuk menyediakan ketahanan pangan yang tahan masa depan, cukup, dan aman bagi negara dengan menggabungkan kedua strategi ini.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau, berlimpah, aman, berkualitas tinggi, dan juga bergizi seimbang merupakan landasan pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai ketahanan pangan regional, pemerintah daerah memegang peranan penting melalui berbagai kebijakan publik yang berkelanjutan. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah harus memenuhi peran regulator dengan membuat undang-undang dan prosedur yang menyediakan kerangka hukum untuk memastikan ketahanan pangan. Misalnya, untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan, pemerintah daerah membuat undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan program ketahanan pangan. Hal ini membantu menjamin ketersediaan pangan pokok, khususnya bagi mereka yang membutuhkan (Irfayanti, 2019). Selain itu, aturan ini mengutip Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang keduanya mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakan

rencana ketahanan pangan sesuai dengan standar federal dengan mempertimbangkan keadaan setempat yang spesifik (Zulaeha et al., 2024).

Selain itu, penyediaan komoditas dan layanan oleh pemerintah daerah memfasilitasi inisiatif ketahanan pangan dan memastikan keberlanjutannya. Pembentukan stok pangan, bantuan teknis yang memadai, dan sumber daya manusia merupakan bagian dari hal ini. Begitu pula dengan fasilitas dan infrastruktur untuk pertanian. Di Kabupaten Rembang, misalnya, Badan Ketahanan Pangan atau Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP & P4K) telah bekerja sama untuk menyusun peta ketahanan atau kerentanan pangan di setiap kecamatan untuk membantu perencanaan yang tepat sasaran dan untuk mendorong pola makan yang lebih bervariasi dan seimbang. Ketiga, pemerintah daerah berperan aktif dalam menarik dan mempertahankan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan untuk mengurangi kemungkinan kerawanan pangan yang parah, pemerintah desa seperti RT dan RW terlibat dalam pendataan dan identifikasi mereka yang menerima bantuan pangan. Selain itu, untuk memastikan bahwa konsumsi masyarakat berkualitas tinggi dan aman, pemerintah kota juga memberikan rekomendasi dan mengawasi keamanan pangan. Keempat, ada sejumlah kendala yang harus diatasi pemerintah daerah untuk memastikan ketahanan pangan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hilangnya lahan pertanian sebagai akibat dari konversi lahan, kerusakan infrastruktur dan fasilitas pertanian, dan kesulitan dalam mengumpulkan data tentang penduduk yang baru saja dirugikan. Akibatnya, kebijakan ketahanan pangan sangat bergantung pada elemen-elemen yang memungkinkan seperti alasan yang mapan untuk pelaksanaan, dukungan dari pemangku kepentingan yang relevan, jalur komunikasi yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, dan aliansi kolaboratif. Dalam hal mencapai ketahanan pangan, pemerintah daerah memainkan peran penting dan multi-aspek yang mencakup mengatur, memfasilitasi, dan memberdayakan masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan publik yang dapat beradaptasi dengan keadaan lokal dan terintegrasi dengan tujuan yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke cukup makanan yang aman dan bergizi. Untuk memastikan ketahanan pangan dalam jangka panjang, pendekatan ini harus disempurnakan dengan tetap mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial ekonomi.

5. KESIMPULAN

Agar pembangunan nasional Indonesia dapat berkelanjutan, ketahanan pangan harus terjamin. Melalui jaringan kebijakan publik yang saling terkait dan terus berubah, pemerintah terutama bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pangan terlalu murah, terlalu tidak stabil, atau keduanya. Tuntutan populasi yang terus bertambah, perubahan pola cuaca, kelangkaan lahan pertanian, harga pangan yang tidak dapat diprediksi, dan ketergantungan pada pasokan pangan asing memerlukan pendekatan baru dari para pembuat kebijakan.

Pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, peningkatan sistem logistik dan distribusi, serta pemberdayaan masyarakat dan petani merupakan inisiatif utama pemerintah. Di tingkat daerah, telah ada upaya nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti pembuatan lumbung pangan, pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, atau inisiatif Desa Pangan Mandiri. Untuk lebih mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu produk pokok seperti beras dan meningkatkan asupan gizi, pemerintah juga mempromosikan diversifikasi pangan.

Program ketahanan pangan pemerintah akan mendapat anggaran yang cukup besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp95 triliun pada tahun 2023. Untuk mempercepat pengembangan industri pangan yang inklusif dan berkelanjutan, berbagai opsi pembiayaan inovatif tengah digunakan, termasuk penerbitan obligasi hijau, pembiayaan mikro, crowdsourcing, kemitraan publik-swasta (KPS), dan sebagainya. Selain menjaga kestabilan harga pangan secara nasional, stimulus fiskal dan subsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah juga mendorong daya beli petani dan nelayan.

Sebagai fasilitator, regulator, dan agen pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah sangat penting. Untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, mereka harus membuat kebijakan, membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam inisiatif ketahanan pangan. Cara terbaik untuk mengelola sumber daya dan teknologi pertanian adalah melalui kerja sama lintas sektor. Ini termasuk pemerintah federal, negara bagian, dan daerah serta sektor komersial, lembaga akademis, dan anggota masyarakat. Kendati demikian, masih banyak permasalahan yang harus diatasi, antara lain sistem logistik yang belum efisien, berkurangnya lahan pertanian, nilai tukar petani yang rendah, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, pendekatan pemerintah harus terus berubah dengan mengutamakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi pertanian mutakhir, dan penciptaan sistem distribusi pangan yang berkelanjutan dan efisien.

Peningkatan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh dan berjangka panjang telah dicapai melalui kebijakan publik terpadu yang didukung oleh sinergi pemangku kepentingan dan inovasi keuangan. Pemerintah Indonesia dapat memastikan ketahanan pangan yang sangat penting bagi pertumbuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang melalui pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan dan komitmen yang teguh.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. In Edumaspul: Jurnal Pendidikan (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Atmoko, D., & Fajarwati, R. A. (2022). Peran stabilitas ketahanan pangan sebagai salah satu bentuk tolak ukur keamanan di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 168–190.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Fiandana, Y., Makmur, M., & Hanafi, I. (2014). Strategi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pangan (Studi pada Kabupaten Malang). *J-PEN Borneo: Jurnal Ilmu Pertanian*, 3(10), 1792–1786.
- Hanunnia, A., Maulana, N. M., Fajri, S., Maulana, H., & Ayu, D. (2025). Analisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Serang. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 696–701.
- Irjayanti, D. R. (2019). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu). In *Jurnal Administrasi Publik*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Maulana, D., Habibi, F., & Purnama, I. N. (2024). Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia melalui pendekatan analisis bibliometric. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(1), 38–50. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2648>
- Miyasto. (2014). Strategi ketahanan pangan nasional guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 1(17), 17–34. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>
- Purwanto, N. P. (2022). Strategi dan alokasi dana ketahanan pangan Indonesia. *Info Singkat*, 15(20).
- Putra, H. D., Lionardo, A., & Agus, A. (2022). Implementasi kebijakan dan pemberdayaan

masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(2), 85–99.

- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Syakirotin, M., Karyani, T., Noor, T. I., Pertanian, F., Padjadjaran, U., Bandung, J. R., & Sumedang, K. (2023). Strategi alternatif mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung. *Prospek Agribisnis*, 1, 162–183.
- Taufik, A., Chaminra, T., Utami, I. R., Isnaad, A. D. P., Gaffar, D. E., & Rusman, M. (2021). Strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan pada masa pandemi di Kabupaten Majene. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 1(2), 178–194. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v1i2.7192>
- Yuliansyah, E., Pramudiana, I. D., Widyawati, & Pramono, S. (2025). Efektivitas implementasi program cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1).
- Zulaeha, M., Ariany, L., Mustika, C. T., Fahlan, S. A., Al-akbar, M. B., & Hasbie, H. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal. *Badamai Law Journal*, 9(2), 280–291.